

LEMBAR FAKTA

Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2023

“Momentum Perubahan: Peluang Penguatan Sistem Penyikapan di Tengah Peningkatan Kompleksitas Kekerasan terhadap Perempuan”

Jakarta, 7 Maret 2024

Tentang Catatan Tahunan Komnas Perempuan

1. Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan diluncurkan setiap tahun untuk memperingati Hari Perempuan Internasional pada tanggal 8 Maret.
2. CATAHU Komnas Perempuan dimaksudkan untuk memaparkan gambaran umum tentang besaran dan bentuk kekerasan yang dialami oleh perempuan di Indonesia dan memaparkan kapasitas lembaga pengadalaan bagi perempuan korban kekerasan.
3. Data yang disajikan dalam CATAHU Komnas Perempuan adalah kompilasi data kasus riil yang ditangani oleh lembaga layanan bagi perempuan korban kekerasan, baik yang dikelola oleh negara maupun atas inisiatif masyarakat. Termasuk di dalamnya adalah lembaga penegak hukum.
4. Data CATAHU juga memuat pengaduan kasus yang diterima, serta hasil pemantauan dan kajian Komnas Perempuan.
5. CATAHU Komnas Perempuan diluncurkan sejak tahun 2001.

Temuan dalam Catatan Tahunan 2023:

1. Secara umum, data kekerasan terhadap perempuan dari Komnas Perempuan, lembaga layanan dan Badan Peradilan Agama (BADILAG) mengalami penurunan (55.920 kasus atau sekitar 12%) dibandingkan tahun 2022 yaitu menjadi 401.975 dari 457.895. Tingkat respon pengembalian kuesioner Catahu 12%, terjadi penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2022 sebanyak 25%. Pengembalian kuisisioner Catahu 2023 sebanyak 123 dari pengiriman kuisisioner sebanyak 993.
2. Pada tahun 2023, terjadi peningkatan tipis dalam jumlah pengaduan kasus kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan ke Komnas Perempuan. Total pengaduan mencapai 4.374 kasus, meningkat sebanyak 3 kasus dari tahun sebelumnya yang mencatat 4.371 kasus.
3. Keseluruhan data kasus kekerasan terhadap perempuan dari tiga lembaga yang teridentifikasi sebagai kekerasan berbasis gender adalah sebagai berikut: Komnas Perempuan mencatat 3.303 kasus, lembaga layanan melaporkan 6.305 kasus, dan BADILAG mencatat jumlah yang jauh lebih tinggi yaitu 279.503 kasus.
4. Tahun 2023, Komnas perempuan mengirimkan permohonan data kekerasan terhadap perempuan ke Badan Pembinaan Hukum (BABINKUM) TNI, Kepaniteraan Mahkamah

Agung, Direktorat Jenderal Peradilan Umum Mahkamah Agung (BADILUM) dan Komisi Nasional Disabilitas dengan mengirimkan kuesioner. Namun data BADILUM belum dapat ditabulasi dan dianalisa menjadi data terkompilasi CATAHU karena jenis datanya berbeda dan belum terverifikasi kekerasan berbasis gendernya. Pada tahun ini Komnas Perempuan juga menerima data dari Kemendikbud, Trade Union Rights Centre (TURC) dan Ruanita Indonesia menjadi lampiran sebagai data tambahan.

5. Berdasarkan Ranah, data kekerasan berbasis gender (KBG) dari Komnas Perempuan, lembaga layanan dan BADILAG, didominasi oleh kekerasan di ranah personal yaitu Komnas Perempuan (1.944 kasus), lembaga layanan (3.294 kasus) dan BADILAG (279.503 kasus). Jumlah kasus ranah personal menjadi dominan karena semua data BADILAG dikategorikan menjadi ranah personal sebab terkait dengan kasus kekerasan dalam keluarga. Sementara itu, data kasus kekerasan terhadap perempuan di ranah publik dan negara meningkat. Pada ranah publik jumlah kasus meningkat 44% dari 2.910 kasus di tahun 2022 menjadi 4.182 kasus di tahun 2023. Sedangkan di ranah negara terjadi peningkatan yang secara signifikan sebanyak 176%, dari 68 kasus tahun 2022 menjadi 188 kasus tahun 2023.
6. Berdasarkan pada bentuk kekerasan, pada lembaga layanan didominasi oleh kekerasan seksual sebesar 2.363 atau 34,80%, diikuti dengan kekerasan psikis sebanyak 1.930 atau 28,50%, kekerasan fisik sebesar 1.840 atau 27,20%, dan kekerasan ekonomi sebesar 640 kasus atau 9,50%. Berbeda dengan lembaga layanan, data Komnas Perempuan menunjukkan bahwa kekerasan psikis mendominasi dengan jumlah sebesar 3.498 atau 41,55%, diikuti dengan kekerasan fisik sebesar 2.081 atau 24,71%, kekerasan seksual sebesar 2.078 atau 24,69%, dan kekerasan ekonomi sebesar 762 atau 9,05%.
7. Pada ranah personal, berdasarkan data dari Komnas Perempuan dan lembaga layanan, Kekerasan Terhadap Istri (KTI) menduduki jumlah tertinggi sebanyak 674 kasus di Komnas Perempuan sedangkan di lembaga layanan sebanyak 1.573 kasus.
8. Data dari Lembaga Layanan menunjukkan bahwa korban kekerasan terhadap perempuan dalam rentang usia 25-40 tahun mencapai 1.918 kasus, sementara pelaku kekerasan dalam rentang usia yang sama mencapai 1.499 kasus. Sedangkan dari data Pengaduan ke Komnas Perempuan, korban kekerasan terbanyak berusia 18-24 tahun dengan jumlah pengaduan sebanyak 1.342, sedangkan pelaku kekerasan terbanyak berada dalam rentang usia 25-40 tahun dengan jumlah pengaduan sebanyak 568.
9. Secara pendidikan, mayoritas korban yang mengadu ke Lembaga Layanan memiliki latar belakang SMA sebanyak 1.721 kasus dan Perguruan Tinggi sebanyak 892 kasus dan mayoritas pendidikan pelaku kekerasan dalam data Lembaga Layanan memiliki pendidikan SMA sebanyak 1.582 kasus dan pendidikan tinggi sebanyak 791 kasus. Sementara itu, korban dan pelaku kekerasan yang melaporkan pengaduan ke Komnas Perempuan mayoritas memiliki latar belakang pendidikan menengah atas (SMA/SLTA/SMK), dengan korban mencatat 957 dan pelaku mencatat 825 pengaduan.
10. Karakteristik Pekerjaan di lembaga layanan; korban Pelajar/ Mahasiswa 2.139 dan karakteristik pelaku adalah Karyawan Swasta; 1.346. Jika dilihat data pelaku lebih terperinci, orang-orang yang diharapkan menjadi pelindung, teladan, dan panutan seperti APH, PNS, Guru, Tokoh Agama dan TNI/POLRI walaupun tidak dominan namun jika

digabungkan juga banyak jumlahnya, ada sekitar 386 orang.

11. Sementara pada pengaduan ke Komnas Perempuan, pekerjaan tertinggi korban adalah Pelajar/Mahasiswa 967 dan Pegawai Swasta sebanyak 568, juga terdapat Ibu Rumah Tangga sebesar 364. Sementara karakteristik pelaku korban tertinggi adalah Pegawai Swasta 422 dan Pelajar/Mahasiswa sebesar 283.
12. Pada ranah publik, data kekerasan terhadap perempuan di Komnas Perempuan paling banyak pada kekerasan di ruang siber (927 kasus), sedangkan di lembaga layanan, kekerasan terhadap perempuan paling banyak adalah kekerasan di tempat tinggal (1.169 kasus).
13. Pada kasus kekerasan terhadap perempuan di ranah negara pada pengaduan di Komnas Perempuan terjadi peningkatan angka dari tahun sebelumnya dari 68 kasus di 2022 menjadi 88 kasus di 2023. Pada ranah ini data didominasi dengan kasus Perempuan Berkonflik dengan Hukum (PBH) sebanyak 24 kasus.
14. Pada 2023, terdapat data kasus kekerasan terhadap perempuan yang menjadi perhatian khusus yaitu:
 - Kekerasan terhadap perempuan pekerja migran Indonesia (PPMI) sebanyak 257 kasus.
 - Kekerasan terhadap perempuan penyandang disabilitas sebanyak 105 kasus.
 - Kekerasan terhadap perempuan HIV/AIDS sebanyak 67 kasus.
 - Kekerasan terhadap perempuan pembela HAM sebanyak 7 kasus.
 - Kekerasan terhadap perempuan minoritas seksual sebanyak 107 kasus.
 - Kekerasan terhadap perempuan dengan pelaku TNI sebanyak 39 kasus dan POLRI sebanyak 87 kasus.
 - Kekerasan siber berbasis gender (KSBG) sebanyak 1.272 kasus.
15. Selama tahun 2023, Komnas Perempuan menerima total 4.374 pengaduan, di mana sebagian besar, yaitu 3.303 pengaduan, merupakan kasus kekerasan berbasis gender. Dalam menangani kasus-kasus tersebut, Komnas Perempuan memberikan dukungan berupa berbagai jenis surat resmi, termasuk Surat Rujukan penanganan korban sebanyak 906 kasus, Rujukan Ulang 34 Kasus, Surat Penyikapan 204 surat, Surat Klarifikasi 51 surat, Surat Rekomendasi 92 surat, dan Surat Pemantauan 61 surat.
16. Dari data berdasarkan bentuk kekerasan pada ranah personal, bentuk kekerasan yang diadukan oleh korban dalam ranah personal ke Komnas Perempuan dan lembaga layanan memiliki tren yang sama, dimana kekerasan psikis menduduki posisi pertama disusul kekerasan fisik, kekerasan seksual dan kekerasan ekonomi. Tingginya kekerasan psikis pada masa post Covid-19 dan pasca pengesahan UU TPKS menunjukkan pentingnya menghadirkan lebih banyak lagi lembaga-lembaga layanan terkait konseling untuk memulihkan korban di seluruh Indonesia.
17. Selama tahun 2023, Komnas Perempuan menerima total 4.374 pengaduan, di mana sebagian besar, yaitu 3.303 pengaduan, merupakan kasus kekerasan berbasis gender. Dalam menangani kasus-kasus tersebut, Komnas Perempuan memberikan dukungan berupa berbagai jenis surat resmi, termasuk Surat Rujukan penanganan korban sebanyak 906 kasus, Rujukan Ulang 34 Kasus, Surat Penyikapan 204 surat, Surat Klarifikasi 51 surat, Surat Rekomendasi 92 surat, dan Surat Pemantauan 61 surat.

18. Selanjutnya, dari 204 surat Penyikapan yang dikirim, jumlah surat respon yang diterima mencapai 81 surat, yang setara dengan 39% dari total surat penyikapan. Dari respon kasus tersebut, sebanyak 30% atau 24 surat menunjukkan bahwa rekomendasi yang diberikan oleh Komnas Perempuan akan ditindaklanjuti, sementara 70% atau 56 surat memberikan jawaban klarifikasi terhadap kasus yang disampaikan. Data ini mencerminkan upaya konkret dari Komnas Perempuan dalam menanggapi dan mengatasi masalah kekerasan berbasis gender yang terjadi di masyarakat.
19. Pada pengaduan ke Komnas Perempuan di ranah personal Kekerasan terhadap Istri (KTI) merupakan jumlah yang tertinggi sebanyak 674 kasus disusul dengan Kekerasan Mantan Pacar (KMP) sebanyak 618 kasus, dan Kekerasan dalam Pacaran (KDP) sebanyak 360 kasus. Hal ini berbeda jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Di tahun 2022, KMP merupakan jenis kasus tertinggi sementara KTI dan KDP menduduki posisi kedua dan ketiga. Kenaikan angka KTI di tahun 2023 ini adalah sebesar 22% dari 2022. Hal ini memperlihatkan bahwa para korban masih terus berada dalam situasi toxic relationship; relasi toksik itu berpindah dari ruang pacaran ke ruang perkawinan.
20. Sementara pada pengaduan ke Lembaga Layanan KTI menduduki posisi tertinggi sebanyak 1.573 kasus di tahun 2023, diikuti KTAP sebanyak 518 kasus dan KDP sejumlah 496 kasus. Ini berarti KTI dan KTAP masih terus terjadi di banyak wilayah di Indonesia dan penting menjadi perhatian dalam pelaksanaan UU PKDRT.
21. Pada tahun 2023, data menunjukkan bahwa pelaku kekerasan seksual yang paling sering adalah orang-orang terdekat dengan korban, dengan mantan pacar memimpin jumlahnya (550 kasus), diikuti oleh pacar (462 kasus) dan suami (174 kasus). Selain itu, kasus eksploitasi seksual juga mengalami peningkatan yang signifikan dari 24 kasus di tahun 2022 menjadi 64 kasus di tahun 2023, menunjukkan perlunya tindakan lebih lanjut untuk melawan fenomena tersebut.
22. Angka kekerasan berbasis gender di ranah publik yang diajukan ke Komnas Perempuan terjadi penurunan dari tahun sebelumnya meskipun angka penurunannya tidak signifikan dari 1.276 kasus pada tahun 2022 menjadi 1.271 kasus di tahun 2023. Pada tahun ini angka Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik (KSBE) menjadi jenis KBG yang paling sering terjadi, dengan 838 kasus (66%). Sementara perempuan di tempat kerja dan tempat umum menjadi sasaran utama, dengan 100 kasus (8%) dan 94 kasus (7%) KBG dilaporkan di kedua tempat tersebut. Selain itu, terdapat juga pengaduan ke Komnas Perempuan terkait kasus PRT (pekerja rumah tangga) sebanyak 4 kasus.
23. Pelaku kekerasan berbasis gender di ranah publik yang diajukan ke Komnas Perempuan pada tahun 2023 didominasi oleh teman media sosial sebanyak 447 pelaku atau 35% dari total pelaku. Data ini menunjukkan bahwa interaksi masyarakat di dunia online semakin meningkat pasca pandemic COVID 19 yang juga berdampak pada interaksi perempuan dalam media sosial. Situasi ini menyebabkan perempuan rentan mengalami kekerasan di ruang siber. Di saat yang sama angka kekerasan terhadap perempuan yang dilakukan oleh Orang Tidak Kenal (OTK) juga cukup tinggi sebesar 278 kasus. Jika didasarkan pada tempat kejadian, data kekerasan terhadap perempuan yang dihimpun dari lembaga layanan pada tahun 2023, kekerasan terhadap perempuan paling banyak terjadi di tempat tinggal

sebanyak 1.169 kasus atau 40% dari total kasus.

24. Data pengaduan Komnas Perempuan dan Lembaga Layanan terkait bentuk Kekerasan terhadap Perempuan di ranah publik pada tahun 2023 memperlihatkan bahwa kekerasan seksual merupakan bentuk kekerasan yang paling tinggi didiadukan oleh korban dalam ranah publik ke Lembaga Layanan mencapai 50% dan ke Komnas Perempuan mencapai 68%. Bentuk kekerasan psikis (24%) di ranah publik pada pengaduan ke Komnas Perempuan menempati urutan kedua, sementara kekerasan psikis pada pengaduan di lembaga layanan memiliki persentase yang sama dengan kekerasan fisik sebesar 22% dari total kasus. Selain itu, data kasus kekerasan ekonomi terhadap perempuan juga menarik perhatian yang masing – masing di Lembaga Layanan sebesar 6% dan di Komnas Perempuan sebesar 3%. Kekerasan ekonomi ini mencakup masalah seperti pembayaran gaji yang tidak sesuai, pemutusan hubungan kerja secara sepihak, upah yang tidak sebanding dengan beban kerja, penipuan, dan ketidakbayaran lembur.
25. Data Komnas Perempuan dan lembaga layanan mengungkapkan data alarm tentang kekerasan terhadap perempuan. Kekerasan seksual berbasis elektronik mencapai puncak tertinggi dengan 991 kasus, menyumbang 35,4% dari total kasus. Pelecehan seksual menempati posisi kedua dengan 711 kasus. Data juga mencatat 180 kasus pencabulan, 143 kasus perkosaan, dan 72 kasus persetubuhan. Sementara itu, terdapat 575 kasus lain yang melibatkan kekerasan seksual.
26. Data kasus kekerasan berbasis gender di ranah negara pada tahun 2023 menunjukkan bahwa DKI Jakarta merupakan provinsi tertinggi dengan angka 90 kasus, Jawa Timur 13 kasus dan Jawa Barat 12 kasus sebagai tiga provinsi dengan angka kasus tertinggi. Berdasarkan data pengaduan ke Komnas Perempuan ditemukan 24 kasus Perempuan yang berhadapan dengan hukum yang melibatkan Aparat Penegak Hukum.
27. Pelanggaran Pekerja Migran Indonesia (PPMI) yang dihimpun oleh tujuh Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) di Indonesia terdokumentasikan sebanyak 257 kasus. Data menunjukkan bahwa International Organization for Migration (IOM) mencatatkan jumlah kasus tertinggi, sebanyak 69 kasus atau sekitar 26.84% dari total kasus yang dilaporkan. Disusul oleh Solidaritas Perempuan dan Yayasan Embun Pelangi dengan masing-masing 42 kasus, yang menyumbang sekitar 16.34% dari total. Sementara itu, International Labour Organization (ILO) Indonesia melaporkan 50 kasus, mencapai sekitar 19.46% dari total kasus.
28. Pada tahun 2023 ini dari total korban Perempuan Pekerja Migran Indonesia (PMII), sebanyak 209 orang berada dalam rentang usia 18 - 40 tahun, menandakan bahwa kelompok usia ini merupakan yang paling rentan terhadap kekerasan. Sementara itu, ada 33 orang dalam rentang usia 41 - 60 tahun yang juga menjadi korban. Selain itu, terdapat 11 orang yang masuk dalam kategori anak, dengan usia 13 - 17 tahun. Sementara itu terkait dengan tingkat pendidikan PPMI yang mengalami kekerasan di tahun 2023 terdapat rentang pendidikan yang terdiri dari SD (Sekolah Dasar) sebanyak 41 orang, SMP (Sekolah Menengah Pertama) sebanyak 68 orang, SMA (Sekolah Menengah Atas) sebanyak 51 orang, PT (Perguruan Tinggi) sebanyak 2 orang, dan Tidak Teridentifikasi sebanyak 95 orang. Kondisi ini menunjukkan bahwa Perempuan Pekerja Migran yang memiliki tingkat pendidikan SMP dan SMA rentan mengalami kekerasan. Dari empat jenis kekerasan

terhadap perempuan yang diidentifikasi, kekerasan ekonomi menonjol sebagai yang paling umum, dengan 137 kasus (43%). Ini diikuti oleh kekerasan psikis (80 kasus, 25%), kekerasan fisik (63 kasus, 20%), dan kekerasan seksual (34 kasus, 10%).

29. Data CATAHU 2023 menunjukkan bahwa perempuan dengan disabilitas mental merupakan kelompok yang paling tinggi mengalami kekerasan sebanyak 40 korban, dilanjutkan dengan disabilitas sensorik sebanyak 33 korban. Disabilitas sensorik terdiri dari disabilitas netra, disabilitas wicara dan disabilitas rungu. Disabilitas intelektual menempati urutan ketiga dengan 20 korban dan disabilitas fisik menempati urutan keempat dengan jumlah korban sebanyak 12 korban. Provinsi dengan angka kasus kekerasan terhadap perempuan dengan disabilitas yang tertinggi di tahun 2023 yaitu Daerah Istimewa Yogyakarta sebanyak 26 kasus.
30. Data CATAHU 2023 menunjukkan bahwa status perkawinan korban perempuan HIV terbanyak adalah menikah (32 korban), kemudian berstatus belum menikah (22 korban), cerai (8 korban). Kondisi ini memperlihatkan bahwa perempuan yang sudah menikah mengalami kerentanan lebih tinggi mengalami kekerasan.
31. Pada CATAHU 2023 terdapat kasus KBG terhadap perempuan pembela HAM (PPHAM) yang dilaporkan ke Komnas Perempuan dan lembaga layanan. Total kasus yang diadukan sebanyak 7 (tujuh) kasus yang berasal dari berbagai ranah yaitu ranah personal 1 (satu) kasus, ranah publik 2 (dua) kasus, dan ranah negara 4 (empat) kasus. Jumlah kasus pada 2023 ini menunjukkan peningkatan cukup signifikan dibanding 2022 yang hanya 1 (satu) kasus.
32. Dibandingkan tahun 2022, kekerasan berbasis gender pada perempuan minoritas seksual di 2023 mengalami peningkatan sebesar 61%. Hal ini penting menjadi perhatian karena mereka adalah bagian dari kelompok marginal. Provinsi terbanyak adalah DKI Jakarta 70 kasus diikuti oleh Jawa Barat sebesar 34 kasus.
33. Untuk kekerasan terhadap pekerja rumah tangga (KPRT) yang awalnya dikategorikan kekerasan di ranah personal, sejak CATAHU 2022 telah dimasukkan dalam kategori kekerasan di ranah publik karena lebih dominannya relasi antara pekerja dan pemberi kerja.
34. Kompleksitas kekerasan terhadap perempuan pada setiap ranah dan yang menjadi perhatian khusus juga dicatatkan pada CATAHU 2023 sebagai data kualitatif.
35. Pada CATAHU 2023, juga menguraikan pembentukan peraturan perundang-undangan pada 2023 baik yang telah diundangkan maupun masih tertunda pembahasannya. Pengundangan peraturan perundang-undangan ini menjadi tantangan sekaligus peluang untuk mendorong kondisi yang kondusif bagi penghapusan kekerasan terhadap perempuan. Sedangkan terkait peraturan perundang-undangan yang telah diundangkan, akan diuraikan hal-hal yang positif yang dapat digunakan untuk mengakses hak atas keadilan, penanganan dan pemulihan korban serta tantangannya. Juga hal-hal yang masih menjadi tantangan untuk mendorong perubahan kebijakan selanjutnya. Disisi lain, terkait rancangan hukum dan kebijakan yang masih tertunda akan disampaikan hambatan-hambatan yang menyebabkan terjadinya penundaan dan dampak dari penundaan penanganan.